

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Aji Basuki Rohmat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum “Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi”. Hal ini berarti bahwa koperasi dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian bangsa sangatlah besar potensinya, karena koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, yang mencerminkan jati diri masyarakat Indonesia.¹

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS). Namun semangat untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional adalah cita cita yang harus diwujudkan.²

¹ Aji Basuki Rohmat, 2015, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 139.

² *Ibid.*

Penjelasan Pasal 33 memposisikan Koperasi baik dalam kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti yang disebutkan di atas, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.³

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 152.240 buah. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif di Indonesia semakin meningkat atau bahkan semakin menurun.⁴

Fakta yang ada di Indonesia, koperasi pada saat ini kurang begitu diminati karena zaman semakin modern maka inovasi-inovasi baru bermunculan dalam dunia usaha. Contohnya dengan adanya supermarket seperti indomaret dan alfamart yang semakin merajalela, dengan rata-rata belasan gerai dalam satu kecamatan, maka lambat laun dapat mematikan

³ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi, 2006-2016*, <https://www.bps.go.id>, Access 31 Maret 2018.

pasar tradisional maupun koperasi. Maka hal ini dapat menggerus sistem koperasi yang sudah lama digagas oleh Bung Hatta.⁵

Hal Ini juga berbeda dengan cita-cita Bung Hatta yang ingin koperasi menjadi sistem ekonomi tulang punggung Indonesia. Bung Hatta melihat koperasi seharusnya bisa untuk menjadi *breadwinner* sistem ekonomi Indonesia tetapi banyak kontradiksi yang terjadi di zaman sekarang dimana kapitalisme lebih berkuasa di pasar Indonesia.⁶

Koperasi seharusnya kembali diberdayakan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dan lingkungan negara tentang pentingnya koperasi.⁷ Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.⁸

Keberadaan beberapa kopersi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat. Terdapat 3 peran dan manfaat koperasi yaitu pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kedua, koperasi

⁵ Zulfikar Tito Enggartiarso, *Pemikiran Bung Hatta dan Relevansinya dengan Kondisi Koperasi Saat ini*, <https://www.scribd.com>, Access 31 Maret 2018, hlm. 2-3

⁶ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

⁸ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Dan ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya.⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, fungsi dan peran Koperasi adalah : 1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; 4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain itu Koperasi adalah wadah tempat orang-orang untuk melaksanakan perjanjian.¹⁰ Menurut ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, salah satu kegiatan koperasi yang berhubungan dengan perjanjian adalah simpan pinjam. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. anggota Koperasi yang bersangkutan;

⁹ Heriyono, 2012, *Peran Koperasi dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat*, Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No. 1, hlm. 41-42.

¹⁰ Matroji, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Permatatabank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Karyawan Permatatabank Bintaro)*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, hlm. 22.

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Menurut data jumlah koperasi simpan pinjam di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 19.507 buah.¹¹ Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.¹² Prinsip yang digunakan oleh koperasi dalam hal pemberian kredit kepada nasabah, yaitu : “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.¹³

Di dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pemberian pinjaman yang sehat didasarkan pada penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.¹⁴ Menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

¹¹ Pramdia Arhando Julianto, *Bappenas Dorong Kontribusi Koperasi terhadap Perekonomian*, <https://ekonomi.kompas.com>, Access 31 Maret 2018.

¹² Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Riska Artanti, 2013, *Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat dalam Penyaluran Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar (Studi Implementasi terhadap Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, Malang, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 7.

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tentang bagaimana bentuk pelaksanaan dari kedua penilaian tersebut, pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya. Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Tetapi pada kenyataannya banyak lembaga keuangan bukan Bank yang juga menghimpun dana seperti layaknya Bank dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Termasuk pada koperasi, sehingga bisa menimbulkan bentuk pidana bagi pengurus ataupun pengelola yang tidak beritikad baik dalam menjalankan pekerjaannya.¹⁵

Lebih lanjut I Gede Hartadi Kurniawan dalam Lex Jurnalica juga menjelaskan mengenai “terjadinya fenomena bahwa tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang mengakibatkan bentuk pidana koperasi bukan tanpa alasan. Pemerintah memberikan kebebasan kepada koperasi untuk melakukan segala bentuk usaha demi memajukan koperasi, tak terkecuali apabila usaha tersebut secara tidak langsung melanggar tujuan, prinsip dan dasar dari koperasi”. Sehingga patut dipertanyakan apa yang menjadi latar belakang

¹⁵ I Gede Hartadi Kurniawan, 2013, *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*, Lex Jurnalica, Vol. 10 No.1, hlm. 2.

tindakan koperasi simpan pinjam tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan tindak pidana.¹⁶

Di dalam kegiatan hukum sehari-hari juga banyak ditemukan perbuatan hukum mengenai perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pada umumnya mereka melakukan perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang.¹⁷

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata hanya terlaksana apabila terdapat izin dari semua pihak yang terkait di dalam perjanjian tersebut.¹⁸ Tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas. Serta menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko (*risk management tool*). Karena besarnya tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut, terdapat hal yang perlu diperhatikan secara cermat dan dipersiapkan secara matang yaitu keabsahan perjanjian.¹⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat sahnya sebuah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁷ M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF, Vol. 26 No. 1, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 50.

¹⁸ Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, hlm. 430.

¹⁹ Lukman, Tri Wahyu Surya Lestari, 2017, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 3.

perjanjian ini juga berlaku dalam hal perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit.

Pada pokoknya pemberian suatu kredit atau piutang dapat diberikan oleh siapa pun yang mempunyai kemampuan dengan melalui perjanjian utang piutang antara si pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan si penerima pinjaman (debitur) yang berada dilain pihak.²⁰ Termasuk pula koperasi yang memiliki kegiatan usaha salah satunya adalah simpan pinjam.

Di koperasi sekalipun dalam pemberian kredit atau piutang memang memiliki resiko yaitu terkadang terdapat masalah salah satunya ialah menimbulkan adanya resiko kredit macet. Dalam hal ini, terdapatnya rentang waktu atau jarak yang diberikan dalam hal pengembalian pinjaman bisa jadi menimbulkan resiko yang sangat besar. Jika itu terjadi maka yang menanggungnya adalah koperasi, terlebih lagi terhadap ketidakpastian akan pengembalian pinjaman dari debitur.

Salah satu contoh kasus yang berkenaan dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah penipuan dan/atau penggelapan oleh Koperasi Simpan Pinjam di Surakarta yaitu kasus Koperasi Manunggal Utama Karya. Modus operandi kasus tersebut adalah dengan penawaran deposito berjangka. Para nasabah mengaku tergiur iming - iming bunga tinggi, sehingga membeli sertifikat deposito berjangka dengan nilai 10 juta rupiah per sertifikat. Karena tergiur keuntungan yang besar, sejumlah nasabah terbujuk untuk membeli belasan sertifikat tersebut. Namun

²⁰ Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang deposito ternyata tidak juga dibayarkan oleh pihak koperasi. Kasus penipuan dan/atau penggelapan tersebut saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan No perkara 2.435/Pen.Pid/2008/PN Ska.²¹

Tidak hanya itu saja, terlebih jaman telah modern dan tentunya pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan orang dalam melakukan suatu tindak kejahatan sangatlah beragam, termasuk salah satunya adalah penggunaan identitas orang lain tanpa hak pada suatu perjanjian kredit. Penggunaan identitas orang lain tanpa hak yang dilakukan dalam hal tersebut hanyalah bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak saja, yang mana hal tersebut pastinya akan merugikan koperasi yang bersangkutan serta menurunkan citranya di mata masyarakat.

Berdasarkan masalah keluarga pada tahun 2010 di Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Guna Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, seorang karyawan yang mempunyai jabatan sebagai bendahara cabang yaitu Ny. Indrawati Utami yang bekerja di KSU Artha Guna tersebut menggunakan identitas orang lain tanpa hak dengan cara menggunakan KTP nasabah asli (yang sudah lunas) dan tidak hutang lagi (kompen) kemudian dimasukkan lagi oleh Ny. Indrawati Utami dengan dalih ingin mengambil hutang lagi. Setelah uang pinjamannya keluar, uang tersebut dipakai sendiri oleh Ny. Indrawati Utami untuk keuntungan pribadi. Karena terlalu banyak menggunakan nama nasabah tanpa hak, dan Ny. Indrawati Utami tidak bisa

²¹ Fitri Kurniyati, 2009, *Kajian Yuridis Penyelesaian Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang Berpotensi Tindak Pidana*, Penulisan Hukum (Skripsi), Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 103-104.

memenuhi tanggung jawabnya membayar angsuran. Pada akhirnya setelah ditelusuri dan usut punya usut terbongkar bahwa Ny. Indrawati Utami sebagai karyawan KSU Artha Ghuna tersebut diketahui menggunakan identitas orang lain tanpa hak dan dinyatakan wanprestasi atas hutang- hutang tadi.

Berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah mengenai kredit macet. Yang disebabkan oleh pemberian kredit yang tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan koperasi. Sehingga dapat mempengaruhi likuiditas keuangan dan kepercayaan para penitip dana atau para nasabah dan calon nasabah. Terlebih pernah terjadi kasus kredit macet yang menyeret beberapa identitas tanpa hak tersebut dilakukan oleh karyawan koperasi yaitu Ny. Indrawati Utami yang pasti sangatlah dipertanyakan mengenai kredibilitas pada saat pemberian kredit dan mekanisme pengolahan data-data identitas nasabah yang telah lunas hutangnya.

Dampak yang timbul oleh kredit bermasalah tersebut adalah keharusan koperasi untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat kredit bermasalah tersebut, selain itu juga menimbulkan kerugian secara materil. Serta Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Guna Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang juga berkewajiban melakukan upaya penyelesaian dari masalah tersebut serta mempertanggung jawabkannya kepada nasabah-nasabah yang namanya telah dipakai tanpa adanya konfirmasi kepada yang tersangkut terlebih dahulu.

Dari beberapa uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN IDENTITAS ORANG LAIN TANPA HAK”** (STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT ANTARA NY. INDRAWATI UTAMI DENGAN KSU ARTHA GUNA JOMBANG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perjanjian kredit dengan sengaja menggunakan identitas orang lain tanpa hak yang dilakukan oleh Ny. Indrawati Utami bila ditinjau dari perspektif hukum perjanjian ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet antara Ny. Indrawati Utami dan KSU Artha Guna Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian kredit dengan sengaja menggunakan identitas orang lain tanpa hak yang dilakukan oleh Ny. Indrawati Utami bila ditinjau dari perspektif hukum perjanjian.

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet antara Ny. Indrawati Utami dan KSU Artha Guna Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu :

Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hukum perjanjian dan memberi pengalaman langsung dalam mengaplikasikan ilmu hukum perjanjian secara teoritis. Serta menghubungkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu pada KSU Artha Guna Jombang untuk pengembangan kelompok hukum perdata dan koperasi.

2. Manfaat Praktis yaitu :

- a. Secara praktis, sebagai syarat mahasiswa untuk memperoleh gelar S1 di bidang hukum.
- b. Secara praktis, dapat memberikan tambahan informasi dan bahan masukan tentang perjanjian kredit beserta upaya penyelesaiannya pada Koperasi khususnya KSU Artha Guna Jombang agar kelak dikemudian hari lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah tanpa terkecuali.
- c. Secara praktis, dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada nasabah atau masyarakat luas agar lebih berhati-hati

dan teliti dalam hal perjanjian kredit agar kelak data diri tidak dipakai untuk penyalahgunaan nama dalam perjanjian kredit.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun langkah peneliti untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah diatas diperoleh dengan jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²² Atau dapat pula disebut sebagai penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²³ Jenis penelitian hukum ini digunakan karena peneliti akan melakukan penelitian terhadap perjanjian kredit beserta upaya penyelesaiannya yang dibuat oleh Ny. Indrawati Utami selaku karyawan di KSU Artha Guna Jombang yang memakai identitas orang lain tanpa hak dalam perjanjian kredit terhadap KSU Artha Guna Jombang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di KSU Artha Guna Jombang yang beralamat kantor di Jalan Pondok Al Hudaya Kwaron kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Penulis memilih tempat penelitian

²² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 16.

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 133.

di tempat ini dikarenakan KSU Artha Guna Jombang merupakan koperasi serba usaha yang memiliki prestasi dari tahun ke tahun di Kabupaten Jombang, terlebih telah beberapa kali memperoleh juara 1 koperasi berprestasi, serta diharapkan menjadi contoh sebagai koperasi berprestasi di Kabupaten Jombang yang patut diteladani oleh koperasi-koperasi lain di lingkup Kabupaten Jombang. Serta penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai aspek perjanjian kredit beserta upaya penyelesaiannya yang dibuat oleh Ny. Indrawati Utami selaku karyawan di KSU Artha Guna Jombang yang memakai identitas orang lain tanpa hak dalam perjanjian kredit terhadap KSU Artha Guna Jombang, sebab kasus mengenai kredit macet yang mana pelakunya adalah Ny. Indrawati Utami selaku karyawan di KSU Artha Guna Jombang dengan menggunakan data orang lain tanpa hak, yaitu data nasabah yang telah lunas hutangnya.

3. Jenis Data

Adapun pengambilan data yang peneliti ambil dan gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang

kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁴ Data primer yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah peneliti mendapatkannya melalui sumber atau bahan hukum yang dapat didapatkan secara langsung dari masyarakat. Adapun data yang peneliti dapatkan dari masyarakat disebut sebagai data lapangan. Berdasarkan kasus pada penelitian kali ini, sumber data lapangan bisa peneliti diperoleh langsung dari wawancara dengan responden dan dokumen dari lokasi penelitian yaitu KSU Artha Guna Jombang.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.²⁵ Data Sekunder yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah peneliti mendapatkannya melalui sumber atau bahan hukum yang bisa didapatkan dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan-perundang-undangan terkait dengan hukum perjanjian, jurnal, penelitian terkait dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung yang terkait dalam penelitian ini.

²⁴ Umi Narimawati, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung, Agung Media, hlm. 98.

²⁵ Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, hlm. 62.

c. Data Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.²⁶ Data Tersier yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah mengenai suatu pengertian yang bersifat baku di dalam bahan hukum yang dapat menjelaskan baik di dalam bahan hukum primer maupun di dalam hukum sekunder. Peneliti mendapatkannya melalui sumber yang dapat didapatkan melalui Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan cara pedoman :

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Melalui wawancara dengan responden peneliti dapat memperoleh serta mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui proses tanya jawab kepada pihak yang terkait serta dianggap mengetahui banyak informasi mengenai perjanjian kredit beserta upaya penyelesaiannya yang dibuat oleh Ny. Indrawati Utami selaku

²⁶ Wikipedia, *Sumber Tersier*, <https://id.wikipedia.org>, Access 28 Maret 2018.

²⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 231.

karyawan di KSU Artha Guna Jombang yang memakai identitas orang lain tanpa hak dalam perjanjian kredit terhadap KSU Artha Guna Jombang. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik yang diwawancarai dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Dalam wawancara ini peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil peneliti, tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Mengenai pengambilan sampel dengan berdasarkan "penilaian" peneliti mengenai siapa saja yang pantas dalam memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel.²⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai responden dari KSU Artha Guna Jombang yang dipilih secara purposive sampling, yang artinya adalah teknik mengambil sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang akan diperlukan.²⁹ Dan akan bertindak sebagai sampel dan populasi penelitian serta diharapkan responden tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah yang terkait dalam penelitian, yaitu kepada :

- 1) Riris Setyos S, S.E., selaku kepala KSU Artha Guna Jombang;
- 2) Ny. Indrawati Utami selaku karyawan di KSU Artha Guna Jombang;
- 3) Karyawan (wawancara biasa)

²⁸ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm. 7.

²⁹ Febriani Puhanda, *Pengertian Teknik Purposive Sampling Menurut Para Ahli*, <https://www.scribd.com>, Access 14 Maret 2018.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsi-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁰ Dalam hal ini penulis mencari dan meminta data yang berhubungan dengan masalah penelitian pada KSU Artha Guna Jombang.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, pendapat-pendapat para sarjana, jurnal, penelitian-penelitian terkait dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian mengenai aspek perjanjian kredit beserta upaya penyelesaiannya yang dibuat oleh Ny. Indrawati Utami selaku karyawan di KSU Artha Guna Jombang yang memakai identitas orang lain tanpa hak dalam perjanjian kredit terhadap KSU Artha Guna Jombang ini.

5. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

³⁰ Margono, 1997, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 187.

³¹ M Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.27.

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas.³² Dalam hal ini pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas data yang diperoleh baik dari lapangan yaitu KSU Artha Guna sebagai tempat penelitian atau pun bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan, yang untuk selanjutnya dianalisis agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang terjadi dalam prakteknya. Sehingga dapat diperoleh suatu hasil kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab akan menguraikan permasalahan secara berurutan sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Hukum yaitu sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang akan mendeskripsikan tentang tinjauan umum mengenai : perjanjian kredit, penggunaan identitas orang lain tanpa hak dalam perjanjian kredit ditinjau

³² Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabet, hlm. 21.

dari perspektif hukum perjanjian, upaya penyelesaian kredit macet. Yang bersumber dari berbagai macam jurnal, buku, serta himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai gambaran KSU Artha Guna, pelaksanaan perjanjian kredit untuk nasabah yang hutangnya telah lunas dan ingin mengajukan hutang kembali, penyalahgunaan identitas nasabah yang hutangnya telah lunas dan tidak mengajukan hutang kembali oleh Ny. Indrawati Utami, upaya penyelesaian oleh KSU Artha Guna. Yang untuk kemudian disajikan serta dijabarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

4. BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berisikan mengenai tanggapan permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.